

Koordinasi Antar-Lembaga Perlu Ditingkatkan untuk Ungkap Aliran Dana Kelompok Terorisme

JAKARTA (IM) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta koordinasi antar-lembaga dalam pengungkapan aliran dana kelompok terorisme perlu ditingkatkan.

Dian mengatakan bahwa saat ini ancaman terorisme di Indonesia masih sangat signifikan karena beragamnya kelompok radikal.

“Koordinasi yang baik antara PPATK, BNPT, Densus 88, BIN dan lainnya perlu ditingkatkan lebih baik agar semakin meningkatkan kinerja pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya pendanaan terorisme,” kata Dian dalam Peluncuran National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, Kamis (19/8).

Lebih lanjut Dian mengungkapkan, saat ini terjadi perubahan pola yang digunakan kelompok terorisme untuk mengumpulkan dana. Awalnya, lanjut Dian, kelompok teroris cenderung menggunakan sponsor pribadi atau fundraiser dengan mengumpulkan dana melalui donasi organisasi kemasyarakatan dan bisnis yang sah.

“Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini ditambah dengan semakin digalakkannya pencegahan

dan pemberantasan TPPT menyebabkan kelompok teroris mencari jalan alternatif baru,” ucapnya.

Dian menyebut pola baru pengumpulan dana itu cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak. Ia menjelaskan beberapa pola baru pengumpulan dana yang dilakukan kelompok terorisme. “Pendanaan menggunakan atau menyalahgunakan korporasi atau badan hukum, menggunakan hasil kejahatan obat-obatan terlarang, aset virtual, pinjaman online, dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata dalam negeri,” tuturnya.

Diketahui dalam kesempatan yang sama Dian juga mengatakan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan narkoba adalah jenis tindak pidana yang memiliki resiko tinggi pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Dian juga menuturkan bahwa kasus TPPU hasil korupsi sektor sumber daya alam telah merugikan negara Rp 37,8 triliun, kemudian korupsi pengelolaan keuangan dan investasi menyebabkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp 16 triliun.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba, Dian mengungkapkan bahwa dalam pengungkapan kasus narkoba skala internasional ditemukan data transaksi hingga puluhan dan ratusan triliun. ● mei

Polsek Toba Sosialisasi Prokes kepada Warga Desa Kedudul

SANGGAU (IM) – Protokol kesehatan (prokes) menjadi bagian tak terpisahkan dalam penerapan tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru. Oleh sebab itu, Polsek Toba melalui Bhabinkamtibmasnya gencarkan sosialisasi protokol kesehatan (prokes).

Anggota Bhabinkamtibmas Desa Kedudul Briпка Kardoro menjelaskan, Sosialisasi ini dilakukan ke seluruh tempat keramaian, di antaranya pasar, yang ada di Wilayah hukum Polsek Toba. Ia menjelaskan bahaya bila tertular virus Corona dengan berharap masyarakat menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan, jika tidak ingin tertular Covid-19.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak salah mengartikan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, sehingga mengabaikan protokol kesehatan.

“Adaptasi Kebiasaan Baru itu adalah tatanan hidup baru dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Semua elemen masyarakat harus patuh menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya, Rabu (18/8). ● mar

memakai sabun.

Briпка Kardoro menjelaskan, Sosialisasi ini dilakukan ke seluruh tempat keramaian, di antaranya pasar, yang ada di Wilayah hukum Polsek Toba. Ia menjelaskan bahaya bila tertular virus Corona dengan berharap masyarakat menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan, jika tidak ingin tertular Covid-19.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak salah mengartikan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, sehingga mengabaikan protokol kesehatan.

“Adaptasi Kebiasaan Baru itu adalah tatanan hidup baru dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Semua elemen masyarakat harus patuh menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya, Rabu (18/8). ● mar

PENGUMUMAN

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dengan ini PT Solutino International, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan Perseroan sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham milik AP Chemical PTE LTD sejumlah 4.187 (empat ribu seratus delapan puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per lembar saham kepada TRELIS GRACE HOLDINGS LIMITED, sehingga setelah pengalihan seluruh saham tersebut dilakukan, maka akan menyebabkan adanya perubahan pengendalian dalam Perseroan menjadi pada TRELIS GRACE HOLDINGS LIMITED.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan di alamat Gedung Sarinah Lt. 12, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Jakarta, 20 Agustus 2021
PT Solutino International
Direksi

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Jokowi: Walau Semua Pelajar Sudah Divaksin Tetap Harus Bermasker

Jokowi berharap anak-anak Indonesia bisa segera belajar tatap muka. Meski begitu, kegiatan itu harus dilakukan hati-hati dengan prokes yang ketat.

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para pelajar, meski semua sudah divaksin masker tetap harus dipakai. Hal ini mengingat virus corona terus bermutasi sehingga memunculkan varian baru.

“Dulu kita ga nyangka bahwa kita pikir hanya ada varian yang pertama tahu-tahu keluar varian delta yang sangat-sangat menular sekali. Oleh sebab itu saya titip kepada anak-anak tetap belajar. Daring tetap belajar. Tapi kalau nanti pas bisa sudah tatap muka pake masker jangan dilupakan,” ujarnya

Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan kepala negara saat meninjau vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayat Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8). Dalam kesempatan itu, Jokowi melakukan konferensi video dengan pelajar dan pihak terkait di sejumlah provinsi.

Saat berdialog, Jokowi menegaskan belajar tatap muka bisa segera dilaksanakan jika semuanya sudah divaksin. “Segera semuanya bisa divaksin. Sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera kita laksanakan,” katanya di Madiun, Kamis (19/8).

Namun Jokowi mengingatkan kegiatan belajar tatap muka harus dilakukan secara hati-hati.

Jokowi berharap anak-anak Indonesia bisa segera belajar tatap muka. Meski begitu, kegiatan itu harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid-19 yang harus dihindari,” pesan Jokowi.

Sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta berpesan agar masker tetap dipakai, meski telah divaksin.

Seperti diketahui bahwa dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker jika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak atau menghindari kontak fisik dengan orang lain, dapat

menghindari seseorang tertular virus. Hal ini perlu diperhatikan pihak sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka.

Pihak sekolah harus memastikan protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat untuk memastikan siswa atau guru-guru tidak menjadi korban keganasan virus Corona.

Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru Elmi Gurita kepada Presiden Jokowi menyampaikan tentang keurduaan anak-anak untuk sekolah tatap muka. Dia mengaku sudah sangat ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

“Kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami Pak. Kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat walafiat,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan pelajar SMAN 5 Pekanbaru Tengku Baihaqi. Dia mengatakan adanya vaksinasi ini akan menjadi angin segar bagi kami siswa dan siswi di Riau.

“Semoga corona cepat berlalu dan kami bisa segera tatap muka,” tuturnya. ● mar

Setengah Anggota DPR Ternyata Belum Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR menurun drastis pada 2021. Setidaknya masih ada sekitar 45 persen lagi anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Pt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengimbau kepada setengah atau tepatnya 45 persen anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk segera memenuhi kewajiban ini. Para anggota DPR diminta untuk jujur dan transparan dalam melaporkan harta kekayaannya.

“Kami mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan kekayaan agar segera memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pence-

gahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap,” kata Ipi melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (19/8).

Ipi menekankan, pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara, sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. LHKPN juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,” pungkasnya.

Para anggota DPR dapat menyetorkan LHKPN melalui aplikasi elhkn.kpk.go.id. Bagi yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkn.kpk.go.id pada tab riwayat lhkn, kolom aksi dan tombol download tanda terima.

Diketahui sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPR untuk semester I tahun 2021 menurun drastis. Hanya sekitar 55 persen anggota DPR yang baru melaporkan harta kekayaannya.

“Legislatif dulu itu 100 persen DPR dan DPRD karena KPU mensyaratkan, kalau mau mau legislatif harus isi LHKPN, jadi 100 persen. Sekarang yang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen, kan kalau sudah masukin tiap tahun harus masukin lagi ya,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. ● mei

PPKM akan Terus Lanjut Selama Pandemi, Masyarakat Pun Harus Tetap Disiplin Prokes

JAKARTA (IM) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, PPKM akan terus berlanjut selama Covid-19 masih menjadi pandemi.

Sebab itu, ia meminta masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan disiplin menerapkan prokes maka mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat dapat dihentikan.

“PPKM ini tetap akan digunakan sebagai instrumen

untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (16/8) malam.

Luhut mengatakan, level PPKM akan diturunkan jika situasi Covid-19 lebih membaik. Sebab itu ia meminta masyarakat agar tetap disiplin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

“Jika situasi Covid-19 makin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Di mana level 2 dan 1 nanti akan mendekati situasi kehidupan normal,” kata Luhut.

Seperti diketahui bahwa penerapan PPKM Level 4

untuk wilayah Jawa dan Bali diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Dengan membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah dapat menekan penularan virus corona yang menyebabkan pandemi Covid-19.

Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 500 hari ini tidak akan selesai-selesai dari bumi Indonesia jika masyarakat tidak mematuhi anjuran pemerintah, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, harus tetap dilakukan meski pun sudah divaksin. ● mar



SOECHI LINES
Quality • Reliability • World Class

PT SOECHI LINES Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt. 51

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Office : +6221-80861000, Fax : +6221-80861001

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020			Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020			Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020		
(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)			(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)			(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	30 Juni 2021	30 Juni 2020	30 Juni 2021	30 Juni 2020	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS					
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Kas dan setara kas	41.908.355	43.899.884	Utang usaha					
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya			Pihak ketiga	4.485.131	4.627.200			
Piutang usaha	16.574.812	12.748.092	Pihak-pihak berelasi	642.837	756.513			
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar AS\$2.240.869 pada tanggal 30 Juni 2021 dan dan AS\$2.295.213 pada tanggal 31 Desember 2020	13.288.080	7.279.300	Utang lain-lain					
Pihak-pihak berelasi	4.760.000	5.999.108	Pihak ketiga	1.012.148	1.405.015			
Piutang lain-lain			Pihak-pihak berelasi	174.576	300.398			
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar AS\$164.174 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	1.868.495	1.930.738	Utang pajak	261.062	510.172			
Pihak-pihak berelasi	660.181	678.483	Utang lainnya	3.150.428	6.994.437			
Selisih lebih estimasi pendapatan diatas kemajuan kontrak	1.691.749	1.272.913	Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pendapatan yang masih harus ditagih	8.908.475	9.417.272	Pinjaman bank dan pembiayaan	30.249.021	27.227.373			
Persediaan	6.155.605	8.198.915	Utang pembiayaan konsumen	174.271	187.501			
Pajak dibayar dimuka	717.761	709.689	TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	40.149.474	42.008.607			
Uang muka dan beban dibayar di muka	9.943.667	14.991.257	LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	706.026	Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					
TOTAL ASET LANCAR	106.477.180	107.831.677	Pinjaman bank dan pembiayaan	177.363.716	177.500.950			
			Utang pembiayaan konsumen	102.566	146.637			
			Utang obligasi	56.635.845	76.592.390			
			Liabilitas imbalan kerja	2.321.463	2.385.813			
			TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	236.423.580	256.625.790			
			TOTAL LIABILITAS	276.573.054	298.634.397			
ASET TIDAK LANCAR			EKUITAS					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan AS\$151.291.364 pada tanggal 30 Juni 2021 dan AS\$147.147.216 pada tanggal 31 Desember 2020	514.491.914	538.328.611	EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK					
Aset pajak tangguhan	188.021	188.021	Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham					
Aset tidak lancar lainnya	21.340.178	13.208.977	Modal dasar - 23.000.000.000 saham					
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	536.020.113	551.725.609	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.059.000.000 saham	65.774.670	65.774.670			
			Tambahan modal disetor	102.233.949	102.233.949			
			Saldo laba					
			Dicadangkan	8.800.000	8.800.000			
			Belum dicadangkan	189.021.966	184.031.321			
			Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	365.630.605	360.639.940			
			Keperentingan Non-pengendali	293.634	282.949			
			TOTAL EKUITAS	365.924.239	360.922.889			
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	642.497.293	659.557.286			
TOTAL ASET	642.497.293	659.557.286						
			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
			Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020					
			(Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)					
				30 Juni 2021	30 Juni 2020			
			Pendapatan Neto	64.898.502	68.422.933			
			Beban Pokok Pendapatan	43.266.928	45.606.943			
			Labas Bruto	21.631.574	22.815.990			
			Beban usaha	5.038.498	5.085.667			
			Labas Usaha	16.593.076	17.730.323			
			Penghasilan (Beban) Lain-lain					
			Pendapatan keuangan	208.470	253.565			
			Beban keuangan	(8.723.938)	(12.647.789)			
			Penerimaan klaim asuransi	-	59.659			
			Labas (rugi) pelepasan aset tetap	(5.025.030)	(656.901)			
			Labas (rugi) selisih kurs - neto	(339.899)	(983.560)			
			Lain-lain - neto	3.637.802	224.964			
			Penghasilan (Beban) Lain-lain - Netto	(10.242.595)	(13.750.062)			
			Labas Sebelum Beban Pajak Penghasilan	6.350.481	3.980.261			
			Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
			Kini - Final	(837.892)	(900.425)			
			Kini - Tidak Final	(511.239)	(1.028.203)			
			Tanggungan	-	-			
			Total Beban Pajak Penghasilan - neto	(1.349.131)	(1.928.628)			
			Labas Tahun Berjalan	5.001.350	2.051.633			
			PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:					
			Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
			Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja					
			Pajak terkait					
			RUGI KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN, SELAIN PAJAK					
			TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.001.350	2.051.633			
			LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
			Pemilik entitas induk	4.990.665	2.039.704			
			Keperentingan nonpengendali	10.685	11.929			
			TOTAL	5.001.350	2.051.633			
			TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
			Pemilik entitas induk	4.990.665	2.039.704			
			Keperentingan nonpengendali	10.685	11.929			
			TOTAL	5.001.350	2.051.633			
			LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK	0,0007	0,0003			

Jakarta, 20 Agustus 2021
PT Soechi Lines Tbk
S, E & O
Direksi

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bersama ini diumumkan bahwa PT Bomba Laju Investama (“BLI”) dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang dilantik oleh BLI berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT Indra Marsell Utama, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (“Perseroan”) dari pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagai pemegang saham yang memiliki hak suara dalam Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

20 Agustus 2021
Horomat kami,